

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi mempunyai peranan untuk menambah pengetahuan atau memperkaya wawasan. Saat ini, informasi bisa diakses dari mana saja dan kapan saja secara mudah dan cepat. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi komunikasi dan informatika semakin beragam. Yang dahulunya informasi hanya bisa didapatkan secara bertatap langsung (*face to face*), kemudian berkembang melalui media cetak dan juga media elektronik, kini suatu informasi bisa didapatkan melalui media sosial. Meskipun dengan kemudahan yang ada, nyatanya masih banyak masyarakat yang masih mengalami kesenjangan informasi dikarenakan oleh sejumlah kendala. Diantaranya seperti kendala karena faktor adanya keterbatasan teknologi, ekonomi, wilayah, tempat tinggal maupun hambatan-hambatan lainnya.

Padahal mendapatkan suatu informasi sangatlah penting, karena dengan informasi tersebut dapat memudahkan kita dalam pengambilan keputusan ataupun hanya untuk memperkaya wawasan akan suatu informasi tersebut, seperti halnya informasi mengenai pertanian, informasi perolehan kredit usaha kecil, informasi tentang penanganan kesehatan, dan informasi tentang mengatasi masalah lingkungan. Salah satu informasi yang cukup penting untuk diperoleh yaitu informasi mengenai pembangunan dan kebijakan dari pemerintahan.

Sebagai organisasi pemerintahan yang berada di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai peranan sebagai

penyedia dan desimasi informasi kepada publik. Untuk itu, beberapa regulasi pun telah diberlakukan untuk menjamin masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan informasi. Salah satu regulasinya yaitu seperti yang terdapat pada Undang-Undang (UU) No. 14 tahun 2008 pasal 9 ayat 4 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dimana dalam UU ini menjelaskan bahwa Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan Informasi Publik yang disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami.¹

Untuk merealisasikan hal tersebut, maka digagaskanlah suatu program kelompok yang berperan sebagai penyedia informasi publik yang diberi nama Kelompok Informasi Masyarakat atau sering disingkat sebagai KIM. Pengertian dari Kelompok Informasi Masyarakat itu sendiri merupakan lembaga yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat yang berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhannya. Selain itu KIM juga dapat digunakan sebagai ‘jembatan’ antara masyarakat dan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan informasi, terlebih lagi mengenai informasi layanan publik yang perlu disebarkan.

KIM bisa terletak di perkotaan ataupun di pedesaan yang anggotanya bisa terdiri dari berbagai profesi baik itu pelajar, mahasiswa, pedagang, petani, nelayan, dan lain sebagainya. Fungsi lain dari KIM itu sendiri sebagai wadah informasi, sebagai mitra dialog dengan pemerintah, sebagai peningkatan literasi masyarakat dibidang informasi dan media serta sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi.

¹ Undang-Undang No, 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan hasil observasi awal di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian kota Gorontalo, saat ini KIM yang terbentuk di kota Gorontalo menurut Iskandar H. Lasandow selaku kepala bagian Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, ada 34 KIM yang sudah dibentuk dan tersebar di beberapa kelurahan maupun kecamatan yang ada di kota Gorontalo. Salah satu Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM yang sudah terbentuk yaitu KIM 'Watopo' yang berada di kelurahan Mo'odu, Kecamatan Kota Timur.²

Adapun peran yang telah dilakukan oleh KIM 'Watopo' dalam menjalankan tugasnya sebagai penyedia dan desimasi informasi publik adalah dengan melakukan penyebaran informasi layanan publik kepada masyarakat khususnya masyarakat di Kelurahan Mo'odu, Kecamatan Kota Timur. Informasi yang mereka sebar pun beragam selama informasi tersebut tidak mengandung unsur sara ataupun informasi yang dapat menyudutkan pihak-pihak tertentu. Salah satu informasi layanan publik yang disebarkan oleh KIM 'Watopo' yaitu informasi mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam hal penyebaran informasi mengenai pembayaran pajak tersebut, Pemerintah Kelurahan Mo'odu, Kecamatan Kota Timur menjadikan KIM 'Watopo' sebagai mitra atau 'jembatan' mereka untuk menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat.

² Wawancara dengan Iskandar H. Lasandow, tanggal 2 Mei 2019 di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Gorontalo

Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pola penyebaran informasi layanan publik yang dilakukan oleh Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) khususnya di KIM 'Watopo'.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalahnya yaitu :

1. Adanya kesenjangan informasi layanan publik yang dialami oleh masyarakat khususnya di kelurahan Moodu
2. KIM Watopo menggunakan berbagai bentuk komunikasi dalam penyebarluasan informasi

1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: "Bagaimana pola penyebaran informasi yang dilakukan oleh Kelompok Informasi Masyarakat (KIM Watopo)?"

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pola penyebaran informasi yang dilakukan oleh KIM 'Watopo' di Kelurahan Mo'odu, Kecamatan Kota Timur

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

a. Manfaat Akademis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Komunikasi terutama dalam hal penyebaran informasi layanan publik.

2) Sebagai rujukan kepada mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang sejenis.

b. Manfaat Praktis

1) Penelitian ini menjadi sumbangsi pemikiran dan menjadi masukan bagi penulis dan Kelompok Informasi Masyarakat 'Watopo' dalam hal penyebaran informasi layanan publik.

2) Sebagai masukan kepada Kelompok Informasi Masyarakat 'Watopo' terkait dengan penyebaran informasi layanan publik.